

INKLUSI PAJAK TERINTEGRASI MATAPELAJARAN MEMBANGUN BUDAYA SADAR PAJAK SEJAK DINI

Syamsu Ridhuan¹, Rahmah Ningsih², Nofia Angela³

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Esa Unggul,

²Fakultas Fisioterapi, Universitas Esa Unggul,

³Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul

Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 15510

syamsu@esaunggul.ac.id

Abstract

The partner of community service activities is the Al-Khasyi'un Islamic Junior High School educational institution in Cipayung Subdistrict, Ciputat District, South Tangerang City, Banten Province. The problem found is that the study of tax inclusion has not been implemented as a national program with integrated subjects. The solution needs to be socialized by conducting training activities for teachers. The goal is for teachers, after participating in socialization activities and training of trainers, to be able to transform their knowledge of tax inclusion in order to build a tax - aware culture from an early age. Methods of implementation, in the form of socialization and training of coaches, to train teachers to become coaches of integrated tax inclusion subjects. media tax inclusion learning materials as well as conducting socialization and training for teachers. It is hoped that the DGC institutions of the Ministry of Ministry of Education and Ministry of Education can follow up by making a pilot project of tax inclusion learning with the learning media that has been developed in more junior high schools in Indonesia.

Keywords: tax inclusion, tax awareness, early.

Abstrak

Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Institusi pendidikan SMP Islam Al-Khasyi'un di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Masalah yang ditemukan adalah belum dilaksanakan pembelajaran inklusi pajak sebagai program nasional yang terintegrasi mata pelajaran. Solusi perlu sosialisasi dengan melakukan kegiatan pelatihan kepada para guru. Tujuan agar para guru setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan tenaga pelatih, dapat mentransformasikan pengetahuan inklusi pajak guna membangun budaya sadar pajak sejak dini. Metode pelaksanaan, berupa sosialisasi dan pelatihan tenaga pelatih, untuk melatih para guru menjadi pelatih inklusi pajak terintegrasi mata pelajaran Hasil kegiatan telah membuat desain Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan - Budaya Sadar Pajak (KSP-BSP), melakukan koordinasi pihak mitra sekolah dan nara sumber pendukung, menyiapkan media bahan pembelajaran inklusi pajak serta melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada para guru. Rekomendasi diharapkan pihak institusi DJP Kemenkeu dan Kemendikbud dapat menindak-lanjuti dengan membuat *pilot project* pembelajaran inklusi pajak dengan media belajar yang telah dikembangkan ini pada sekolah-sekolah SMP yang lebih banyak lagi di Wilayah Indonesia.

Kata kunci : inklusi pajak, sadar pajak, sejak dini.

Pendahuluan

Inklusi pajak merupakan suatu program nasional, untuk memberikan pembelajaran kepada warga masyarakat agar sadar pajak. Salah satu sasaran pembelajaran adalah siswa sekolah, dari sekolah dasar sampai dengan mahasiswa di Perguruan Tinggi. Tujuan untuk membangun budaya sadar pajak melalui institusi pendidikan nasional (Tim Edukasi Perpajakan. 2016). Model pembelajaran inklusi pajak yang paling mudah diterapkan di sekolah adalah model integrasi mata pelajaran. Karena tidak harus menambah jam

pelajaran dan menambah guru, melainkan cukup menyisipkan atau insersi materi pengayaan inklusi pajak sebagai media pembelajaran.

Ada beberapa mata pelajaran yang bisa diinsersi pengayaan media bahan ajar inklusi pajak, antara lain mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia dan Agama (Ristekdikti. 2017). Seluruh mata pelajaran yang bisa diinsersi itu dapat menjadi subjek pelaksanaan pembelajaran inklusi pajak. Sebagai *pilot project* terbatas dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan tenaga pelatih di sekolah

menengah pertama (SMP), yaitu SMP Islam Al-Khasyi'un Ciputat.

Kebijakan nasional yang tertuang dalam *roadmap* edukasi sadar pajak, bahwa mulai tahun 2017 hingga 2030 merupakan masa edukasi kesadaran pajak, yang dibelajarkan kepada peserta didik, tenaga pendidik, orang tua dan masyarakat. Dengan demikian, seyogyanya sekolah sudah mengintegrasikan materi pengayaan inklusi pajak pada mata pelajaran, sehingga muatan media belajar inklusi pajak sebagai materi pengayaan kesadaran pajak dapat disertakan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik di sekolah di seluruh penjuru tanah air.

Pada institusi-institusi pendidikan SMP di wilayah tanah air, masih belum banyak yang tersentuh oleh kementerian/lembaga perpajakan yang berkopoten melakukan sosialisasi inklusi pajak. Padahal seharusnya sasaran prioritas pada bidang pendidikan untuk siswa dan guru sudah harus dilaksanakan sejak tahun 2019 (Ditjen Pajak. 2017). Namun ikhwal tersebut belum dapat dilaksanakan, karena adanya keterbatasan faktor sumber daya yang membuat kegiatan edukasi sadar pajak di sekolah-sekolah belum terlaksana maksimal.

Dalam ilmu pendidikan (*paedagogy*, bahwa pada usia dini, anak-anak hingga remaja, manusia masih memiliki daya ingat yang kuat terhadap pengetahuan yang didapat dari proses belajar, karenanya sangat mudah untuk merubah dan membentuk sikap dan keperibadian untuk menjadi orang yang taat terhadap aturan, norma dan nilai-nilai yang ditanamkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Apa lagi kegiatan pembelajarannya dilaksanakan secara berulang-ulang dan berkelanjutan (Ratnawati. 2020). Dihipotesis bahwa sejumlah siswa yang diajar dengan media materi pengayaan inklusi pajak yang terintegrasi dengan matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, akan membuat siswa (sumber daya manusia) sadar budaya pajak sejak dini dan konsisten dalam kehidupan sepanjang hayatnya.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan tenaga pelatih kepada guru-guru dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan, agar para guru yang telah diberi pembekalan materi pengayaan inklusi pajak, dikemudian hari dapat mentransformasikannya kepada peserta didik. Dengan demikian, maka para guru memiliki kompetensi yang diharapkan dalam program inklusi pajak terintegrasi mata pelajaran.

Kompetensi berupa kemampuan guru membelajarkan media bahan belajar pengayaan inklusi pajak kepada para siswa SMP dengan baik dan benar. Karena secara metodis dan teknis dimatangkan pada saat kegiatan sosialisasi dan pelatihan berlangsung. Terutama membuat media

belajar inklusi pajak sebagai materi pengayaan diintegrasikan dalam matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Bagi para dosen yang bernaung pada wadah institusi Perguruan tinggi, sudah merupakan suatu keniscayaan dan kewajiban dalam mentransformasikan berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, melalui program pengabdian pada masyarakat (Ristek Dikti. 2016; Sani, dkk. 2015).

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan kepada mitra di SMP Islam Al-Khasyi'un Ciputat. Metode kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pelatih. Peserta adalah guru bidang studi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia dan Agama.

Langkah-langkah kegiatan (1) menyusun desain pelatihan, (2) koordinasi dengan sekolah mitra untuk persiapan kegiatan pelatihan, dan dengan kementerian/lembaga pajak guna minta dukungan sumber-sumber belajar inklusi pajak, (3) mengembangkan media bahan belajar pengayaan inklusi pajak terintegrasi mata pelajaran, (4) pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan di sekolah mitra, dan (5) Peaporan kegiatan.

Transformasi pembelajaran inklusi pajak diawali dengan penguatan kompetensi guru dalam memahami dan menguasai media bahan belajar inklusi pajak. Sebagai transformator, guru harus memiliki kompetensi tambahan yang mendukung misi budaya sadar pajak sejak dini. Salah satunya melalui upaya pembelajaran inklusi pajak yang terintegrasi dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Para tenaga pendidik (guru) diberikan pelatihan sebagai tenaga pelatih. Produknya adalah guru berkompentensi sebagai tenaga pelatih inklusi pajak di sekolah.

Hasil dan Pembahasan

Desain Sosialisasi dan Pelatihan

Desain atau rancangan kegiatan menganut model integrasi antara sosialisasi dan pelatihan untuk tenaga pelatih. Secara sederhana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan transformasi pengetahuan, sikap dan keterampilan tentang cara-cara membangun budaya sadar pajak untuk para siswa di sekolah. Motivasi mengintegrasikan kegiatan sosialisasi dengan pelatihan, menjadi model yang dikembangkan tersendiri, yang diberi nama model "Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan - Budaya Sadar Pajak disingkat KSP-BSP" adalah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terhadap mitra pada SMP Islam Al-

Khasyi'un, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Ada empat langkah yang harus disiapkan untuk melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan - Budaya Sadar Pajak (KSP-BSP). Keempat langkah tersebut adalah (1) Menyiapkan media bahan pembelajaran; (2) mempersiapkan calon institusi mitra antara lain adalah sekolah (SD, SMP, SMA) yang akan menjadi subjek pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; (3) menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran berupa ruang belajar; dan (4) melaksanakan kegiatan pembelajaran berupa kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk tenaga pelatih.

Desain sosialisasi dan pelatihan KSP-BSP, memiliki kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan di lapangan, dari hasil identifikasi dapat diketahui bahwa:

Kekuatan, desain ini diyakini memiliki kekuatan atau kelebihan atas ketersediaan media bahan belajar yang dirancang secara khusus dan fokus bagi pembangunan sumber daya manusia. Terjadi efektivitas dan efisiensi dari kegiatan hasil pembelajaran relatif sangat tinggi, karena transformasinya dilaksanakan secara terintegrasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Agama dan Bahasa Indonesia. Khusus untuk kegiatan pengabdian ini, pembelajaran inklusi pajak difokuskan guru kepada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Yaitu guru-guru bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajar dari kelas VII sampai dengan kelas IX. Artinya seluruh siswa akan mendapatkan pembelajaran inklusi pajak, secara berulang dan berkelanjutan dari guru yang telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan.

Kelemahan, desain ini terbatas pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan KSP-BSP, hal ini terkait dengan keberadaan media bahan belajar. Sehingga apabila ada yang ingin menggunakan, harus diadaptasi dan masih perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkait dengan komitmen institusi mitra dan ketersediaan sarana dan prasarana belajar. Hal ini penting, agar fleksibilitas desain sosialisasi dan pelatihan dapat dimanfaatkan dengan baik dan hasil yang maksimal.

Koordinasi dengan Mitra dan Nara Sumber Pendukung

Pelaksanaan koordinasi dengan pihak mitra berkaitan dengan rencana tindak lanjut kegiatan sosialisasi dan pelatihan KSP-BSP bagi guru bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Bahasa Indonesia. Sedangkan koordinasi dengan pihak nara sumber pendukung, dalam hal ini berhubungan dengan personil Kantor Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat yang membidangi inklusi pajak, berkaitan dengan

pengayaan sumber bahan media yang akan dikembangkan Tim.

Koordinasi dengan pihak mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu pihak SMP Islam Al-Khasyi'un, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disepakati bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan KSP-BSP pada tanggal 2 Juni 2021 bertempat di SMP. Pihak mitra menyiapkan ruang kelas, sarana pembelajaran (sosialisasi dan pelatihan) dan peserta yaitu para guru bidang studi terkait. Sedangkan dari pihak Tim Pelaksana Abdimas, menyiapkan media bahan belajar dan nara sumber.

Masukan dari hasil koordinasi dengan pihak nara sumber pendukung, dalam hal ini kepada personil Kantor Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat yang membidangi inklusi pajak, adalah pemberian arahan teknis pelaksanaan dan tambahan pengayaan referensi materi inklusi pajak, dalam bentuk *soft copy* yang bisa di *download* pada <https://www.pajak.go.id/>. Sebaliknya Tim Abdimas memberikan masukan terkait dengan konsepsi dan temuan yang baru tentang media bahan belajar inklusi pajak bagi sekolah. Pengembangan bahan media belajar tersebut dibuat dengan menarik, mudah dipahami, kreatif dan inovatif serta ditransformasikan dalam bentuk *soft copy*.

Langkah-Langkah Pelaksanaan Kegiatan

Operasionalisasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan KSP-BSP, dilaksanakan dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : **Pertama**, menyiapkan media bahan belajar dengan ciri-ciri yang menarik, praktis, mudah dimengerti dan dipahami oleh peserta atau siapa saja yang memiliki minat untuk menjadi narasumber, pelatih atau guru. Media bahan ajar dalam bentuk seperangkat pengetahuan tentang materi pengayaan pembelajaran yang akan ditransformasikan. Media belajar merupakan alat bantu menyampaikan pesan tentang materi belajar yang diformulasikan dalam bentuk poster, gambar dan *pointer-pointer* yang memiliki pesan penting dalam mempengaruhi pikiran, sikap dan tindakan warga belajar.

Langkah **kedua**, mempersiapkan calon institusi mitra antara lain adalah sekolah (SD, SMP, SMA) yang akan menjadi subjek pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mengapa sekolah yang menjadi subjek prioritas mitra? Karena sekolah merupakan institusi pendidikan yang membangun dan mengembangkan sumber daya manusia sejak dini. Di sekolah diajarkan pengetahuan tentang moral (agama), etika baik-buruk bersikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, transformasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk menciptakan manusia

menjadi insan yang cerdas spiritual, emosional dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan budaya sadar pajak adalah bagian integral tanggungjawab institusi pendidikan untuk mendidik anak bangsa agar sadar pajak sejak dini.

Di sekolah sudah tersedia, tenaga pendidik (guru) yang akan dilatih menjadi tenaga pelatih, pengajar dan pendidik sejati. Ketersediaan guru di sekolah merupakan suatu keniscayaan, bahwa sekolah-sekolah formal dipersyaratkan harus ada guru atau tenaga pendidik. Melalui proses pembelajaran, guru bisa dengan mudah meng-inklusi pengetahuan budaya sadar pajak, yaitu dengan memberikan perlakuan khusus dan menarik perhatian siswa, seperti contoh-contoh yang diselipkan dalam media mengajar. Namun tidak mengurangi kompetensi utama dan esensi dari materi pelajaran pokok. Misalnya materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Agama.

Di sekolah sudah ada siswa atau peserta didik, yang sesungguhnya merupakan subjek utama untuk didik agar menjadi insan yang sadar pajak sejak dini. Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia, sangat efektif dan efisien dilakukan di bangku sekolah. Pengalaman empirik dari hasil-hasil penelitian, baik yang dilakukan penulis maupun dari hasil studi kepustakaan, seperti teori kertas kosong-*Tabularasa*, dari filosof John Locke dikatakan bahwa seorang anak ibarat selembar kertas kosong. Orang tuanyalah yang memberikan goresan, warna dan menaburinya dengan aksara melalui pengalaman dan keteladanan yang akan ditangkap oleh seluruh panca indranya.

Pengetahuan, yang masuk ke dalam pikiran seorang anak, akan mengendap dan menjadi tongkat sandarannya dalam bertindak. Dari 250 juta jiwa masyarakat Indonesia, sebanyak 65% didominasi generasi muda. Apabila ingin mensejahterakan suatu negara, maka pendidikan generasi mudalah yang menjadi perhatian utama. Negara seperti Indonesia yang 75% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaranya masih bergantung pada pajak, memiliki tanggung jawab besar mendidik generasi mudanya agar sadar pajak bahwa anggaran pembangunan dari sektor pajak menjadi masukkan utama untuk APBN. (Sri Lestari. 2017).

Langkah **ketiga** menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran berupa ruang belajar, meja kursi, *white board*, spidol, LCD, laptop (komputer), dan lainnya yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Secara detail yang dimaksud dengan sarana dan prasarana belajar, adalah sarana pembelajaran merupakan sarana pendidikan meliputi semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Sedangkan prasarana pembelajaran merupakan prasarana pendidikan meliputi fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti : halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. (Lukman. 2018).

Langkah **keempat**, melaksanakan kegiatan pembelajaran berupa kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk tenaga pelatih. Pembelajaran yang dimaksud adalah sosialisasi tentang pengenalan pengetahuan budaya sadar pajak, sedangkan pelatihan menyangkut teknik dan metode pembelajaran, mentransformasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam membangun budaya sadar pajak.

Produk sosialisasi adalah terlaksana kegiatan transfer pengetahuan dari nara sumber tim dosen pengabdian kepada masyarakat Universitas Esa Unggul kepada para guru bidang studi, terutama guru bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan guru yang lain adalah guru bidang studi Agama dan guru bidang studi Bahasa Indonesia. Pada prinsipnya semua guru diajak untuk ikut serta mengikuti kegiatan sosialisasi, karena dalam kegiatan sosialisasi belum diberikan bimbingan khusus tentang teknis insersi materi budaya sadar pajak yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran.

Kegiatan pelatihan untuk tenaga pelatih, guru bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan diberikan bimbingan khusus tentang insersi media bahan belajar budaya sadar pajak. Hal ini terkait dengan teknis menginsersi atau memasukkan materi budaya sadar pajak, pada bagian materi pokok bahasan yang lebih relevan dengan materi pembelajaran. Pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kenyataannya di setiap pokok bahasan bisa diselipkan media bahan belajar insersi budaya sadar pajak, sehingga tidaklah sulit untuk menentukan pada pokok bahasan mana saja yang harus diinsersi. Namun demikian diperlukan kecermatan dalam mempersentasikan insersi materi bahasan budaya sadar pajak, berupa pesan khusus yang dikemas dalam media belajar, agar lebih menarik dalam penyajiannya.

Pesan dan Media yang Dikembangkan

Konten pesan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan target yang akan dicapai, dalam hal ini diperlukan untuk mengajak para siswa membudayakan hidup sadar pajak. Kata membudayakan dimaksud adalah untuk menjadikan sesuatu “pekerjaan” menjadi kebiasaan dilakukan sepanjang hidup, tanpa harus disuruh atau dipaksa oleh pihak lain. Pertanyaannya bagaimana bisa menjadi kenyataan? Manusia butuh pengetahuan,

pada awalnya manusia tidak tahu kemudian setelah melihat dan belajar menjadi tahu. Setelah tahu, belum tentu akan mengerjakannya apa lagi hal tersebut tidak dibutuhkan.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana agar sesuatu yang telah diketahui dapat diubah menjadi kebutuhan? Padahal sesuatu pengetahuan yang telah diketahui itu, tidak berhubungan langsung dengan hasrat dan keinginan untuk melakukannya. Pada tahap ini manusia butuh *treatment* yaitu suatu perlakuan yang harus disampaikan secara berulang-ulang, terus-menerus dan berkesinambungan agar menjadi paham. Ada kebiasaan yang sudah diketahui sejak dahulu tidak butuh ada *treatment* dan dilakukan tanpa disadari, sudah mendarah-daging, seperti kebiasaan menjaga kebersihan tubuh atau badan. Dapat dipastikan bahwa setiap manusia normal, apabila merasa dan melihat tubuh atau fisiknya kotor, maka segera akan membersihkannya, mandi atau mencuci pada bagian tubuh yang kotor tersebut.

Ada kebiasaan yang dilakukan oleh manusia setelah mendapatkan *treatment* secara berulang-ulang, terus-menerus dan berkesinambungan. Kata perlakuan dimaksud adalah suatu rangsangan yang mendorong seseorang untuk berbuat dan menjadi kebiasaan. Contoh membiasakan hidup sehat dengan berjalan 10.000 langkah setiap hari, merupakan kebiasaan baik yang sulit untuk diterapkan terutama bagi pekerja yang waktu bekerjanya dihabiskan di belakang meja, rapat-rapat, di depan laptop atau komputer, sopir dan lainnya. Tetapi jika diberikan pemahaman yang terus menerus dan solusi, misalkan berjalanlah bila sedang mau ke kantin, *food court*, ke parkir atau sengaja berjalan kaki ke *selter* untuk menaiki kendaraan umum busway, angkot atau kereta.

Demikian pula dengan memperkenalkan budaya sadar membayar pajak, justru kalau bisa, semua manusia tidak mau membayar pajak. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan hasrat dan keinginan, karena membayar pajak berarti mengeluarkan sebagian uang atau harta untuk diberikan kepada negara. Padahal manusia, secara umum lebih senang menerima, jarang (meski ada juga) yang suka memberi kepada sesama. Tetapi membayar pajak, berbeda esensinya dengan memberi, apa lagi sedekah uang atau harta yang memiliki tendensi supranatural keyakinan terhadap kepada Tuhan. Sehingga membayar pajak belum menjadi perhatian, apa lagi kebutuhan. Mengapa? Pajak berhubungan dengan kewajiban terhadap negara, karena negara membutuhkan dana dari sektor pajak untuk dapat melaksanakan pembangunan.

Memberikan pengertian bahwa setiap warga negara ada kewajiban untuk membayar pajak

membutuhkan komunikasi-edukasi. Suatu pesan komunikasi yang bila disampaikan secara langsung oleh seorang (komunikator) atau melalui media dapat dengan mudah melekat pada ingatan penerima pesan (komunikan). Penerimaan pesan diikuti dengan suatu kesadaran yang tinggi, bahwa pesan tersebut bukan hanya sekedar pesan biasa, melainkan secara totalitas ada misi yang menarik, sehingga mendorong untuk melakukannya. Meskipun demikian, pesan akan kurang efektif kalau hanya disampaikan sekali atau sedikit, tetapi harus dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Salah satu tempat yang menjadi pusat transformasi pesan membudayakan sadar pajak dan dipandang sangat efektif dan efisien adalah institusi pendidikan.

Konten Pesan yang Dikembangkan

Bagaimana agar suatu pesan lebih menarik perhatian, mudah dimengerti dan gampang dipahami? Katakalah pesan “Budaya Sadar Pajak” ingin diekspose ke publik dengan tujuan untuk mengajak masyarakat melaksanakan kewajiban membayar pajak tanpa paksaan, namun timbul dari hati nurani untuk melakukannya. Keadaan seperti itulah yang diharapkan oleh pembuat pesan, produsen atau sponsor tertentu, dengan mengkomunikasikan pesan tersebut melalui media pada acara-acara tertentu hingga diterima oleh sasaran. Kalau konten pesan dan penyajiannya menarik, akan selalu diingat. bila pesan tersebut menggunakan bahasa gaul dan sederhana, tentu akan mudah dimengerti dan dipahami oleh sasaran. Pasti pesan tersebut akan selalu diingat, dan pada saatnya akan diadopsi atau dilakukan sesuai dengan maksud pesan tersebut.

Mengemas pesan menjadi menarik dan mudah dipahami untuk para siswa SMP, tentu tidaklah sulit namun butuh keseriusan dalam mengembangkannya. Pada hakikatnya, pesan untuk siswa SMP adalah suatu pembelajaran, yang membutuhkan proses untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Memang untuk mendarah-dagingkan pesan-pesan moral, dorongan dan ilmu pengetahuan, harus dimulai pada usia dini pada anak-anak sekolah SD, SMP dan SMA. Pada usia tersebut daya ingat manusia masih sangat kuat, apalagi kalau diberikan secara berulang, terus-menerus dan berkelanjutan, tentu pesan akan akan melekat dalam ingatan. Tindak-lanjut penerimaan pesan yang sudah melekat (mendarah-daging) dalam ingatan tersebut, akan mendorong perubahan pandangan, sikap dan perbuatan untuk melakukannya dengan tanpa paksaan.

Mengacu pada kerang berpikir di atas, maka pengembangan pesan-pesan membangun budaya sadar pajak dilakukan. Model pengembangan pesan

budaya sadar pajak untuk siswa SMP, dibuat dengan nalar yang sederhana yaitu menggunakan prinsip 5 W+1H. Apa itu pajak, siapa yang harus membayar pajak, mengapa harus membayar pajak, kapan harus membayar pajak, dimana harus membayar pajak dan bagaimana cara membayar pajak?

inklusi pajak dengan media bahan belajar yang telah dikembangkan pada sekolah-sekolah SMP yang lebih banyak lagi di Wilayah Indonesia.



Gambar 1. Media Bahan Belajar

Ini merupakan salah satu contoh media bahan belajar inklusi pajak dapat diintegrasikan mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan yang telah dikembangkan oleh Tim Abdimas. Sebelum mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, disiapkan dulu jawaban-jawabannya berupa media bahan belajar. Prinsip ini lazim disebut sebagai cara belajar dengan logika berpikir terbalik. Jawaban-jawaban tersebut dimuat dalam poster, *power point*, brosur atau buku praktis yang berisi pesan pembudayaan sadar pajak

Kesimpulan

Pengembangan media bahan belajar inklusi pajak terintegrasi mata pelajaran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan membangun budaya sadar pajak sejak dini. Melalui kegiatan abdimas telah dibuat desain Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan - Budaya Sadar Pajak (KSP-BSP), dilakukan koordinasi pihak mitra sekolah dan nara sumber pendukung, menyiapkan media bahan belajar inklusi pajak serta melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada para guru. Pengembangan pesan-pesan membangun budaya sadar pajak dilakukan dengan membuat model media bahan belajar yang sederhana yaitu menggunakan prinsip 5 W+1H

Rekomendasi diharapkan pihak institusi DJP Kemenkeu dan Kemendikbud dapat menindaklanjuti dengan membuat *pilot project* pembelajaran

Daftar Pustaka

- Kemenkeu. (2017). *Pembelajaran Kesadaran Pajak pada Sistem Pendidikan Nasional. Bahan Sosialisasi Inklusi Pajak*. Jakarta : Ditjen Pajak.
- Kemristekdikti. (2017). *Panduan Pembelajaran Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Man, Lukman. (2018 Nopember 5). Pengembangan Sarana Pendidikan. *man1bengkalis.sch.id*. Diakses dari <https://man1bengkalis.sch.id/editorial/pengembangan-sarana-pendidikan>
- Pujastuti, Sri Lestari. (2017 Oktobe 12). Menyelipkan Pajak pada Lembar Tabula Rasa. *Pajak.go.id*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/menyelipkan-pajak-pada-lembar-tabula-rasa#>:
- Ridhuan, Syamsu (2020). Pembelajaran Menyenangkan Model Team Games Tournament Dapat Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Eduscience Universitas Esa Unggul Jakarta*, 1 (2), 22-46.
- Ridhuan, Syamsu. (2021). Hasil Survey Pendahuluan. *Dokumen Sekolah*. SMP Islam Al-Khasyi'un, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
- Susanto, Ratnawati. (2020). *Model Pengembangan Kompetensi Pedagogik, Teori, Konsep dan Konstruk Pengukuran*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Ristek-Dikti (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. *Biro SDM Ristek-Dikti Jakarta*, 2(2), 2-16.
- Tim Edukasi Perpajakan. (2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak dalam Perguruan Tinggi*. Jakarta : Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikdikti dan Ditjen Pajak Kemenkeu